

# **PENERAPAN ANP UNTUK PEMILIHAN LOKASI PRIORITAS KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU (KIHT) DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**Wiwik Budiawan\*, Aldimas Hutasoit**

*Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro,*

*Jalan Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275*

## **Abstrak**

*Pemilihan Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi dan mengawasi industri hasil rokok serta menekan peredaran industri rokok illegal. Penelitian ini dilakukan untuk mencari kriteria yang berpengaruh terhadap pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau. Setelah didapatkan kriteria yang berpengaruh, dicari bobot dari kriteria tersebut berdasarkan potensi wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kemudian dilakukan skoring lokasi untuk menentukan alternatif daerah strategis pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah Analytical Network Process. Kriteria yang digunakan adalah bahan baku, pasar tenaga kerja, transportasi dan kebijakan pemerintah. Subkriteria yang mempengaruhi adalah ketersediaan sumber bahan baku, kualitas Bahan Baku, jumlah penduduk, UMR penduduk, jumlah tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, Pelabuhan dan insentif dari pemerintah. Hasil dari perhitungan bobot subkriteria paling berpengaruh berturut-turut adalah UMR penduduk, sumber bahan baku dan jumlah tenaga kerja. Sedangkan hasil prioritas alternatif yang dihasilkan secara berturut-turut adalah Kudus, Jepara, Kebumen, Purworejo dan Brebes.*

**Kata Kunci :** Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), *Analytical Network Process (ANP)*

## **Abstrak**

*The selection of the location of the Tobacco Products Industrial Estate is an effort by the government to increase production and supervise the tobacco products industry and suppress the circulation of the illegal cigarette industry. This research was conducted to find criteria that influence the formation of the Tobacco Products Industrial Estate. After obtaining influential criteria, the weight of these criteria was sought based on the potential of districts / cities in Central Java. Then location scoring was carried out to determine alternative strategic areas for the establishment of the Tobacco Products Industrial Estate in Central Java. The method used is Analytical Network Process. The criteria used are raw materials, labor market, transportation and government policy. The influencing sub-criteria are the availability of raw material sources, quality of raw materials, population, population UMR, number of workers, quality of labor, ports and incentives from the government. The results of the calculation of the most influential sub-*

*criteria weights in a row are population minimum wage, raw material sources and the number of workers. While the resulting alternative priority results are Kudus, Jepara, Kebumen, Purworejo and Brebes.*

**Keywords:** Tobacco Products Industrial Estate, *Analytical Network Process* (ANP)

## 1. PENDAHULUAN

Seluruh produk tembakau Indonesia diolah oleh Industri Hasil Tembakau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015, Industri Hasil Tembakau (IHT) mengolah sebagian atau seluruh bahan baku tembakau, baik dengan atau tanpa cengkeh, untuk menghasilkan produk tembakau yang memiliki nilai tambah.

Indonesia sangat diuntungkan oleh Industri Hasil Tembakau (IHT), yang menyerap tenaga kerja, menghasilkan uang negara melalui cukai, dan bertransformasi menjadi komoditas vital bagi petani melalui hasil perkebunan seperti tembakau dan cengkeh. Ada beberapa fungsi ekonomi penting yang dimainkan oleh industri hasil tembakau. Yang paling signifikan dari tanggung jawab ini adalah meningkatkan pendapatan negara melalui cukai (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melaporkan bahwa pada tahun 2020, porsi IHT terhadap APBN adalah 10,11%. Dengan cukai hasil tembakau yang menyumbang persentase terbesar terhadap total penerimaan (170,24 triliun rupiah, atau meningkat 3,24%), penerimaan cukai tahun 2020 mencapai 205,68 triliun rupiah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, rokok, cerutu, Produk yang mengandung tembakau yang dikenakan

cukai meliputi rokok elektronik, tembakau iris, rokok daun, dan produk olahan tembakau lainnya (HPTL). Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2015-2024, produksi tembakau Indonesia cenderung meningkat yaitu pada tahun 2015 sebesar 193,79 ribu ton menjadi 238,81 ribu ton pada tahun 2023 (Kementerian Pertanian, 2024). Dengan asumsi proyeksi pendapatan industri tembakau meningkat setiap tahun, bisnis tembakau akan tetap menjadi sumber utama pendapatan cukai bagi negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan kondisi perkembangan industri rokok tersebut memicu munculnya peredaran rokok ilegal. Adanya rokok ilegal ini akan berdampak merugikan utamanya dalam penerimaan cukai. Terjadi potensi kehilangan penerimaan cukai dengan adanya peredaran rokok ilegal di pasaran. Berbagai upaya telah dilakukan dalam pemberantasan rokok ilegal, baik melalui sosialisasi maupun penegakan hukum. Namun sejauh ini peredaran rokok ilegal masih terjadi. Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan.

Menurut Warsito (2020). Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) merupakan lokasi pemusatan kegiatan usaha yang terkait dengan hasil tembakau, sebagaimana tercantum dalam Perusahaan yang bergerak di kawasan industri hasil

tembakau telah membangun dan memelihara prasarana, sarana, Mempertimbangkan fasilitas tambahan di bidang ini untuk meningkatkan layanan pelanggan di kawasan ini untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen, memajukan industrinya, serta mengawasi kegiatan produksi dan distribusi hasil tembakau.

Pembentukan KIHT akan membawa banyak manfaat bagi pengusaha rokok skala kecil. Manfaat tersebut meliputi tempat produksi, perizinan, kemampuan untuk menunda pembayaran pesanan pita cukai, dan kemampuan untuk memproduksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) melalui sistem sewa mesin KIHT, sehingga tidak perlu membeli mesin. Perusahaan tembakau lain di KIHT dapat memanfaatkan mesin yang dimiliki oleh pengusaha lokal. Selain itu, kawasan industri hasil tembakau dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil menengah hasil tembakau dan dapat memotivasi seluruh pelaku usaha rokok untuk memproduksi secara legal dalam rangka pemberantasan rokok ilegal (Dirjen Bea dan Cukai, 2021). Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT), Peraturan Menteri Perindustrian tersebut mengatur tentang pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan KIHT. Peraturan tersebut mempertimbangkan kebutuhan, capaian, dan keterbatasan anggaran pusat.

Penelitian di Indonesia telah banyak memanfaatkan strategi pemilihan

kawasan industri. Misalnya, Bagus dkk. (2017) menggunakan *Analytical Hierarchy Process* untuk mengevaluasi tujuh kriteria atau parameter potensi lahan dalam pengembangan kawasan industri di Kabupaten Sukoharjo. Nuryadi dkk. (2020) menggunakan Exponential Comparison Method (MPE) untuk mengkaji lokasi potensial bagi agroindustri rumput laut di Provinsi Sulawesi Tenggara dan menentukan peringkat faktor-faktor yang menentukan penempatannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang jika digabungkan akan membentuk Kawasan Industri Hasil Tembakau. Setelah didapatkan kriteria yang berpengaruh, dicari bobot dari kriteria tersebut berdasarkan potensi wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kemudian dilakukan *skoring* lokasi untuk menentukan alternatif daerah strategis pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Jawa Tengah. Pembobotan dan *skoring* menggunakan metode *Analytical Network Process*.

ANP memiliki beberapa kelebihan dibandingkan AHP, yaitu pengukuran sejumlah faktor dalam jaringan yang dilakukan dalam ANP tidak memerlukan adanya independensi antar kriteria maupun subkriteria. Selain itu, hasil prediksi ANP lebih akurat karena prioritasnya ditingkatkan dengan umpan balik.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian diawali dengan identifikasi masalah melalui studi pendahuluan yang terdiri atas studi literatur dan studi lapangan. Setelah dilakukan studi

pendahuluan didapatkan rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu menentukan kriteria yang paling berpengaruh dan urutan alternatif daerah Pembangunan KIHT menggunakan metode ANP. Selanjutnya dilakukan penentuan responden dan pengumpulan data, pemilihan kriteria dan subkriteria berdasarkan penelitian sebelumnya, merancang kuesioner, menentukan hubungan kriteria dan subkriteria, melakukan pengolahan data menggunakan metode ANP dengan bantuan *software Superdecision*, melakukan analisis, dan menarik kesimpulan.

a. Data Alternatif dan Responden

Secara garis besar, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui prioritas daerah di Jawa Tengah yang berpotensi untuk pembangunan kawasan industri hasil tembakau. Sehingga perlu dilakukan redaksi daerah mana saja yang akan dibuat menjadi alternatif penelitian. Berdasarkan Permenperin No.40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kawasan

Industri, pemilihan lokasi pembangunan kawasan industri dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu : (1) bagi daerah yang sudah memiliki pertumbuhan industri berdasarkan orientasi pasar (market oriented) digunakan pendekatan permintaan lahan (land demand). Ukuran yang dapat langsung digunakan sebagai indikasi suatu wilayah layak dikembangkan sebagai kawasan industri apabila dalam wilayah tersebut permintaan akan lahan industri rata-rata pertahunnya sekitar 7-10 ha atau perkembangan industri manufaktur dengan tingkat pertumbuhan minimum lima unit usaha dimana satu unit usaha industri manufaktur membutuhkan lahan sekitar 1,32-1,34 ha; dan (2) bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam sebagai bahan baku industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah perlu diciptakan kutub pertumbuhan baru (growth pole). Daerah berpotensi mendirikan KIHT/SIHT hasil survei Disperindag Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 1:

**Tabel 1 Daerah Alternatif Penelitian**

No	Kabupaten / Kota	Jumlah IKM			
		Rokok	Tembakau Bukan Rokok	IKM Legal	IKM Ilegal
1.	Kabupaten Jepara	41	1	42	-
2.	Kudus	89	0	89	-
3.	Brebes	9	0	7	1
4.	Kebumen	165	2	13	150
5.	Purworejo	41	0	30	10

b. Pemilihan Kriteria dan Sub Kriteria

Pada penelitian ini kriteria dan sub kriteria dipilih berdasarkan penelitian sebelumnya dan kemudian responden

akan memilih kriteria yang sesuai. Kriteria dan subkriteria terpilih ditunjukkan pada Tabel 2.

**Tabel 2 Kriteria dan subkriteria terpilih**

No	Kriteria	Subkriteria
1	Bahan baku	Ketersediaan sumber bahan baku
		Kualitas Bahan Baku
2	Pasar	Jumlah penduduk
		UMR penduduk
3	Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja
		Kualitas tenaga kerja
4	Transportasi	Pelabuhan
5	Kebijakan Pemerintah	Insentif dari pemerintah

c. Perancangan Kuesioner

Kuisisioner yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kuisisioner. Kuisisioner pertama merupakan kuisisioner yang bertujuan untuk melakukan validasi terhadap kriteria dan subkriteria untuk diolah menggunakan metode *cut off point*. Kuisisioner kedua merupakan kuisisioner yang bertujuan untuk melakukan uji perbandingan berpasangan dalam menentukan bobot subkriteria dalam penelitian ini.

d. Pengolahan Data Menggunakan Metode ANP

ANP adalah salah satu metode dalam *multi criteria decision making* yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan banyak kriteria. ANP digunakan untuk memilih proyek, pengambilan keputusan strategis, pemilihan alternatif, prediksi performa, dan pembobotan. Berikut langkah-langkah menggunakan metode ANP (Kusumawardani dan Sedyono, 2016) :

1. Membuat model ANP berdasarkan kriteria dan subkriteria yang ditemukan melalui studi literatur.
2. Melakukan perbandingan berpasangan dan mencari nilai eigen.
3. Menghitung rasio konsistensi, dimana rasio konsistensi tersebut harus sama atau kurang dari 10%. Jika nilainya lebih dari 10% maka penilaian data keputusan harus diperbaiki.
4. Membuat supermatriks sebagai hasil vektor prioritas dari perbandingan berpasangan antar cluster, kriteria, dan alternatif. Supermatriks terdiri dari tiga tahap, yaitu Supermatriks Tidak Tertimbang (*Unweighted Supermatrix*), Supermatriks Tertimbang (*Weighted Supermatrix*), dan Supermatriks Limit (*Limmiting Supermatrix*).

**3. Hasil dan Pembahasan**

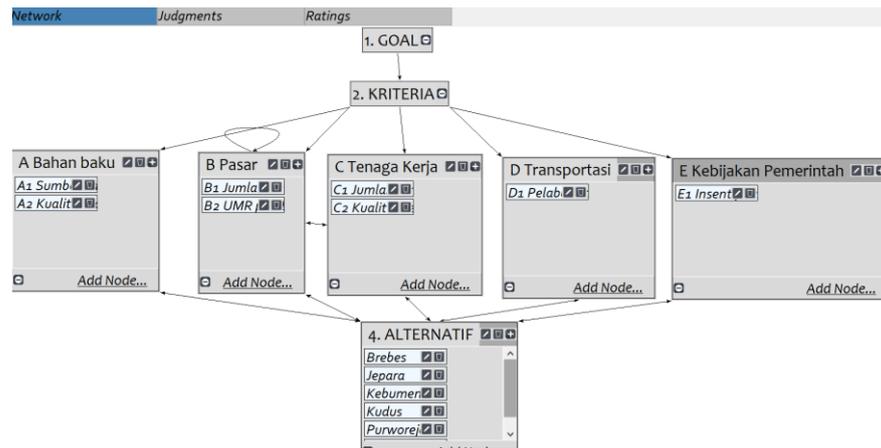
**Validasi Kriteria dan Subkriteria**

Nilai rata-rata keseluruhan masing-masing kriteria berdasarkan responden kemudian diurutkan untuk dicari nilai terbesar dan terkecilnya. Setelah diurutkan, dihitung nilai *natural cut off point* untuk kriteria dan subkriteria. Dari hasil perhitungan, didapatkan nilai *natural cut off point* untuk kriteria adalah 3,5, sedangkan nilai untuk subkriteria adalah 3. Maka, kriteria yang memiliki nilai di bawah 3,5 dan subkriteria yang memiliki nilai di bawah 3 akan dibuang. Dari pemilihan strategi yang akan dipakai. 5 kriteria lolos uji validasi, sehingga 5 kriteria akan digunakan dalam penelitian ini. Namun, terdapat 4 kriteria yang tidak lolos uji validasi, yaitu transportasi, tapak,

utilitas dan aksesibilitas. subkriteria ini tidak akan dimasukkan ke dalam pemilihan lokasi. Dari subkriteria terdapat 8 subkriteria yang lolos dan 10 subkriteria yang tidak lolos.

### Struktur Jaringan ANP

Hubungan antar subkriteria dimodelkan melalui *software Super Decision*. Hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Network ANP pada *Super Decisions*

### Matrix Perbandingan Berpasangan

Perbandingan berpasangan dilakukan dengan membandingkan elemen dalam tiap kluster terhadap *control criterion* dan kluster terhadap kontribusinya untuk goal. Perbandingan berpasangan dilakukan dengan menggunakan skala satu sampai sembilan yang merepresentasikan tingkat kepentingan antara dua elemen terhadap *control criterion*. Perbandingan berpasangan menggunakan Superdecision dapat dilihat pada gambar 2.

Perhitungan nilai CR ini dilakukan kepada responden pada penilaian *node* dan *cluster*. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya jawaban yang tidak konsisten yang diberikan oleh responden. Syarat data dapat digunakan adalah memiliki nilai  $CR \leq 0.1$ . Apabila nilai  $CR > 0.1$ , maka jawaban yang diberikan oleh responden dianggap tidak konsisten sehingga perlu peninjauan kembali oleh responden. Contoh perhitungan nilai CR pada salah satu responden dapat dilihat pada gambar 3. Rekapitulasi CR dapat dilihat pada tabel 3.

### Perhitungan Rasio Konsistensi

Comparisons wrt "Pemilihan Lokasi KIHT" node in "2. KRITERIA" cluster  
 Bahan baku is strongly to very strongly more important than Kebijakan Pemerintah

1. Bahan baku	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Kebijakan Pe-
2. Bahan baku	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Pasar
3. Bahan baku	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Tenaga kerja
4. Bahan baku	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Transportasi
5. Kebijakan Pe-	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Pasar
6. Kebijakan Pe-	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Tenaga kerja
7. Kebijakan Pe-	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Transportasi
8. Pasar	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Tenaga kerja
9. Pasar	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Transportasi
10. Tenaga kerja	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Transportasi

Gambar 2 Perbandingan Berpasangan

Choose Node A1 Sumber baha~  
 Cluster: A Bahan baku  
 Choose Cluster 4. ALTERNATIF

Comparisons wrt "A1 Sumber bahan baku" node in "4. ALTERNATIF" cluster  
 Jepara is equally to moderately more important than Brebes

1. Brebes	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Jepara
2. Brebes	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Kebumen
3. Brebes	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Kudus
4. Brebes	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Purworejo
5. Jepara	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Kebumen
6. Jepara	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Kudus
7. Jepara	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Purworejo
8. Kebumen	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Kudus
9. Kebumen	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Purworejo
10. Kudus	>=0.5	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9	>=0.5	No comp.	Purworejo

Inconsistency: 0.03991

Brebes	0.04443
Jepara	0.06270
Kebumen	0.52991
Kudus	0.08280
Purworejo	0.28016

Gambar 3 Contoh Perhitungan Consistency Ratio pada Software Superdecision

Tabel 3 Rekapitulasi Perhitungan Consistency Ratio

Rekap CR	CR
Pemilihan Lokasi-Cluster Kriteria	0,02970
A1- Cluster Alternatif	0.03991
A2- Cluster Alternatif	0,03991
B1- Cluster Alternatif	0,02655
B2- Cluster Alternatif	0,05301
C1- Cluster Alternatif	0,05301
C2- Cluster Alternatif	0,04451
D1- Cluster Alternatif	0,02722
E1- Cluster Alternatif	0,01520

### Bobot Akhir

Hasil akhir metode ANP pada penelitian ini merupakan bobot akhir. Bobot akhir ini didapatkan dari hasil pengolahan data menggunakan metode ANP pada software Superdecision. Bobot akhir yang didapatkan merupakan bobot akhir subkriteria. Subkriteria yang

memiliki bobot terbesar merupakan prioritas yang paling penting dalam penentuan lokasi strategis. Prioritas yang dihasilkan sebagai output software Superdecision adalah bobot berdasarkan klaster (normalized by cluster) dan bobot keseluruhan (limiting). Rekapitulasi bobot akhir yang didapatkan dari software Superdecision terdapat pada tabel 4.

Prioritas subkriteria diurutkan berdasarkan bobot keseluruhan (*limiting*). Urutan prioritas terdapat pada tabel 5 dan 5.

### Analisis Hasil

Metode ANP digunakan untuk melakukan pembobotan terhadap subkriteria pada penelitian ini. Kemudian membuat model pada Software Superdecision. Model tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1. Selanjutnya, uji perbandingan berpasangan dilakukan untuk mengetahui tingkat kepentingan subkriteria. Kuisioner pada uji perbandingan berpasangan ini dihasilkan secara otomatis oleh *Software Superdecision* berdasarkan pada model yang telah dibuat. Pertanyaan mengenai kriteria (*cluster*) diajukan apabila kriteria tersebut dipengaruhi oleh kriteria yang lain. Sedangkan, pertanyaan mengenai subkriteria (*node*) diajukan jika ada lebih dari satu subkriteria yang dipengaruhi subkriteria yang sama. Jawaban dari pakar-pakar terpilih harus konsisten, sehingga diperlukan perhitungan *consistency ratio* (CR). Perhitungan nilai CR dilakukan melalui Software Superdecision dengan memasukkan nilai yang diisi oleh pakar ke dalam menu *Judgements – Questionnaire*. Apabila nilai  $CR > 0.1$ , maka jawaban tersebut tidak konsisten, sehingga perlu peninjauan kembali oleh pakar terpilih. Pada subkriteria UMR penduduk didapatkan data dari Badan Pusat Statistik (2023) UMR Kudus adalah 2.439.814,00. Jepara memiliki UMR 2.272.627,00, Kebumen 2.035.890,00, Purworejo 2.043.902,00 dan Brebes 2.018.837,00. Pada subkriteria sumber bahan baku didapatkan data dari Badan Pusat Statistik

(2021) Kudus tidak memiliki lahan tembakau, Jepara juga tidak memiliki lahan tembakau, Kebumen memiliki lahan tembakau seluas 707,00 ha, Purworejo 469,10 ha dan Brebes tidak punya lahan tembakau. Kemudian subkriteria jumlah tenaga kerja berdasarkan Badan Pusat Statistik (2023) pada Kudus adalah 489.161 orang, Jepara 676.472, Kebumen 813.172, Purworejo 469.977 orang dan Brebes sebanyak 1.039.846.

**Tabel 4 Bobot Prioritas ANP**

Subkriteria	Normalized by Cluster	Limiting
A1 Sumber bahan baku	0,54591	0.051438
A2 Kualitas bahan baku	0,45409	0.042787
B1 Jumlah Penduduk	0,32353	0.044382
B2 UMR penduduk	0,67647	0.092800
C1 Jumlah tenaga kerja	0,51667	0.056327
C2 Kualitas tenaga kerja	0,48333	0.052692
D1 Pelabuhan	0,50000	0.094225
E1 Insentif dari pemerintah	0,50000	0.094225
Brebes	0,11483	0.054101
Jepara	0,24745	0.116580
Kebumen	0,23757	0.111923
Kudus	0,26933	0.126886
Purworejo	0,13083	0.061635

**Tabel 6 Urutan Prioritas Sub Kriteria**

Urutan Prioritas	Subkriteria	Limiting
1	B2 UMR penduduk	0.092800
2	A1 Sumber bahan baku	0.051438
3	C1 Jumlah tenaga kerja	0.056327
4	E1 Insentif dari pemerintah	0.094225
5	D1 Pelabuhan	0.094225
6	C2 Kualitas tenaga kerja	0.052692
7	A2 Kualitas bahan baku	0.042787
8	B1 Jumlah Penduduk	0.044382

**Tabel 5 Urutan Prioritas Alternatif**

Urutan Prioritas	Alternatif	Limiting
1	Kudus	0.126886
2	Jepara	0.116580
3	Kebumen	0.111923
4	Purworejo	0.061635
5	Brebes	0.054101

#### 4. Kesimpulan

Kriteria yang mempengaruhi Pemilihan Lokasi KIHT di Jawa Tengah adalah bahan baku, pasar tenaga kerja, transportasi dan kebijakan pemerintah. Subkriteria yang mempengaruhi adalah Ketersediaan sumber bahan baku, Kualitas Bahan Baku, jumlah penduduk, UMR penduduk, jumlah

tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, Pelabuhan dan insentif dari pemerintah. Hasil dari perhitungan bobot subkriteria berturut-turut adalah UMR penduduk dengan bobot 0.092800, sumber bahan baku dengan bobot 0.051438, jumlah tenaga kerja dengan bobot 0.056327, Insentif dari pemerintah 0.094225, Pelabuhan 0.094225, kualitas tenaga kerja 0.052692, kualitas bahan baku 0.042787 dan jumlah penduduk 0.044382. Sedangkan hasil prioritas alternatif yang dihasilkan secara berturut-turut adalah Kudus dengan nilai bobot 0.26886, Jepara 0.116580, Kebumen 0.111923, Purworejo 0.061635 dan Brebes 0.054101

#### 5. Daftar Pustaka

- Cahyadi,dkk. (2018). Penentuan Lokasi Potensial Pengembangan Kawasan Industri Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Geodesi Undip*, 7(1), 163-171
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2021). Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota 2019-2021. Diakses dari <https://jateng.bps.go.id/indicator/153/613/1/luas-wilayah-menurut-kabupaten-kota.html>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). Membina Industri Hasil Tembakau Skala Kecil Menengah. *Warta Bea Cukai Vol 52*. Jakarta
- Indonesia. 2021. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6736. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Limanseto, Haryo. (2021, 30 November). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pengembangan Inovasi dan Teknologi Industri Hasil Tembakau. Diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3497/pengembangan-inovasi-dan-teknologi-industri-hasil-tembakau>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.4/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau. Jakarta.
- Menteri Perindustrian Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Produksi Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020. Jakarta.
- Menteri Perindustrian Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.
- Nuryadi, dkk. 2020. Pemilihan Lokasi Strategis Agroindustri Rumput Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology*, 16(4), 278-285
- Warsito, Ignatius. (2020, Desember). Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) tentang Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Terkait Pengembangan Dan Pengawasan Industri Hasil Tembakau. Diakses dari <https://djk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Kebijakan-Pengembangan-Kawasan-Industri.pdf>
- Haryono, Imam. 2007. Road Map 2007–2020 Industri Hasil Tembakau dan Kebijakan Cukai; Prosiding Lokakarya Nasional Agribisnis Tembakau. Surabaya, 7 Juni 2007. ISBN: 978-979-17503-0-1. Malang: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.
- Kumalasari, M.W. 2012. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemilihan Lokasi Industri Manufaktur Skala Besar dan Sedang. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Rianto, I. B., Santoso, E. B. (2018). Mengetahui tingkat kepentingan indikator dan menentukan lokasi serta memetakan lahan yang berpotensi Kawasan Industri Tekstil. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. *Jurnal Teknik ITS*, 7 (1), 2337-3520.
- Mulyatini, dkk. 2023. Analisis Potensi Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Dalam Perspektif Ekonomi. *Jurnal Penelitian Pendidikan di Indonesia*, 9 (1), 334-340.
- Ramadhani. F. S. N. (2021). PENGARUH KONDISI DEMOGRAFI, KETENAGAKERJAAN, DAN EKONOMI TERHADAP

PENGANGGURAN TERDIDIK DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.

Rahane, S.K., and Saharkar, U.R. (2014). Traffic Congestion-Causes and Solutions: A Study of TalegaonDabhade City. *J. Inf. Res. Civil Engineering*, 3(1): 160-163.

Jalagat, Revenio & Jalagat, Almalinda. (2016). Causes and Effects of Traffic Jam in Muscat City, Sultanate of Oman. *International Journal of Science and Research (IJSR)*. 5. 785-787. 10.21275/ART20163550.

Yunianto, Dwi. 2021. Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. *Journal FEB Unmul*, 23 (4): 687-698.